PERAN KAUM MUDA DALAM POLITIK INDONESIA

Saveriano Kevin Haba¹, Hilarius Joy Kaku²
habasaveriano@gmail.com¹, jemparujoy@gmail.com²
Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir isu terkait politik menjadi isu yang kerap kali diperbincangkan, dan isu itu menjadi tema perbincangan yang sangat urgensi dan menarik di kalangan masyarakat terkhusus kaum muda. keberadaan kaum muda dalam rana politik menjadi hal yang urgensi untuk bisa mendobrak dinamika politik yang tidak etis. Baiknya Kehidupan politik dalam suatu bangsa dan negara ditentukan oleh dinamika politik yang berakhlak. Namun realita yang menggerogoti kehidupan politik di era ini adalah politik yang acap terjerembab dalam hingar bingar perebutan kekuasaan, yang mengeliminasi maknanya. di balik itu yang menjadi intensi politik etis dengan intervensi kaum muda adalah mengedepankan rasionalitas, bukan emosionalitas, kecerdasan, bukan manipulasi, kedalaman refleksif dan bukan dalam kungkungan ide-ide profokatif. Fenomena ini menjadi kecemasan bagi kaum muda hampir di semua negara. mengingat pembicaraan tentang peran kaum muda dalam menyikapi dinamika politik yang luas, penulis membatasi diri dengan mengulas situasi politik di Indonesia menjelang pemilu.

Kata Kunci: Peran, Kaum Muda, Politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda dan Jepang, kaum muda menempati peran yang sangat baik di kala itu. Bahkan kaum muda menjadi tonggak dari integritas perjuangan menentang penjajah. Peran tersebut terus disandang kaum muda hingga di era ini. Selain sebagai pengontrol untuk mengontrol segala kebijakan yang diambil atau dibuat pemerintah, kaum muda juga secara aktif mengkritisi sistem pemerintahan yang tidak seturut norma hukum yang berlaku dan menggugat untuk mengganti petinggi negara yang tidak memimpin secara baik guna memerdekakan demokrasi.

Dalam skala internasional, bukan hanya Indonesia yang mengalami fenomena demikian. Di mana terjadinya perubahan politik di Filipina pada 1986, keterbukaan ekonomi China pada 1984, dan paket Perestroika, Glasnost, dan Demokratisasi di Uni Soviet 1989, menciptakan imajinasi politik segar bahwa kekuasaan otoriter dapat ditumbangkan.

Dalam dinamika perpolitikan Indonesia menjelang pemilu 2024, kaum muda kembali berpartisipasi aktif dalam menyuarakan untuk memilih capres dan cawapres, serta calon anggota legislatif (caleg) yang bermoral, serta tidak terlibat dalam, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Antusiasme kaum muda dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 mengindikasikan ideologi kaum muda akan pemimpin yang berintegritas moral dan mampu mentransformasi bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Bertolak dari dinamika politik yang terjadi, apakah eksistensi kaum muda menjadi suatu hal yang urgensi dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia? Apakah eksistensi politik di Indonesia sejauh ini sudah berjalan seturut cita-cita bersama? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini dapat merangsang penulis untuk menerawang lebih jauh terkait partisipasi kaum muda dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Selain itu, penulisan esai ini juga berorientasi pada satu refleksi terkait eksistensi politik menjelang pemilu, yang mungkin saja bisa berkontribusi ide atau gagasan terkait persoalan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep: peran

Berdasarkan definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Peran tersebut merupakan suatu aspek status kedudukan yang memiliki arti penting untuk menghasilkan manfaat. Dalam pandangan para ahli, peran dilihat sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain : pertama. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. kedua. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam. masyarakat. ketiga. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jika dipahami dalam konteks peran dalam politik, peran yang dimaksud merupakan sebuah status yang berupa tindakan untuk dapat dilaksanakan demi menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat dan melaksanakan harapan-harapan masyarakat terhadap partai politik.

Konsep: Kaum Muda

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, pemuda dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda yang memiliki terminologi yang beragam. Untuk menyebut pemuda, digunakan istilah *young human resources* sebagai salah satu sumber pembangunan. Mereka adalah generasi yang ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan yang memiliki kualifikasi efektif dengan kemampuan dan ketrampilan yang didukung penguasaan iptek untuk dapat maju dan berdiri dalam keterlibatannya secara aktif bersama kekuatan efektif lainnya guna penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Dalam arti lain, kaum muda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga kaum muda merupakan sumber daya manusia pembangunan.

Potret Buram Gerakan Politik Kaum Muda

Memperjuangkan negara demokrasi adalah tanggung jawab seluruh kalangan dalam bumi pertiwi. ALDERA adalah gerakan kaum muda yang berperan penting dalam perjuangan itu. Gerakan ini tercatat dalam gelombang prodemokrasi menentang rezim otoritarianisme Orde Baru. Gerakan ini adalah proyeksi sosial yang dirintis oleh Pius dkk, yang tidak hanya sebagai entitas perlawanan terhadap kekuasaan diktator Soeharto, melainkan suatu usaha untuk mengkonstruksi masa depan negara atau bangsa Indonesia pasca-Orde Baru. Gerakan ini juga sebagai pioner, yang mewarnai dinamika gerakan kaum muda progresif di dekade terakhir kekuasaan Orde Baru, yang bermula di awal 1990-an melalui gerakan pembelaan petani dan pemuda yang berujung pada gerakan politik. Niat dan intensi kaum muda untuk menjaga keutuhan demokrasi merupakan upaya memperjuangkan kemerdekaan nasional dan membangun visi tentang sistem kenegaraan modern yang demokratis yang diawali oleh generasi 1908 dan generasi 1928.

Kaum muda terdidik Indonesia di era Kolonial merupakan para perintis kemerdekaan yang umumnya memilih model kekuasaan politik berbasis kedaulatan rakyat pasca runtuhnya kolonialisme di akhir perang dunia 11. Yang kemudian upaya kaum muda Indonesia usai menumbangkan kolonialisme merupakan satu tarikan napas dengan upaya membangun sebuah negara baru berdasarkan sistem demokrasi modern. dalam kaitannya dengan fenomena yang menggerogoti panggung politik di hari-hari ini, kaum muda menjadi faktor utama perubahan dan dinamika politik nasional. Dengan kehadiran kaum muda sebagai *agent of change*, jalan kritis untuk mengkritisi sistem kepemimpinan yang berusaha membajak keberadaan negara hukum demokrasi mesti ditunggangbalikkan. Karena kaum

muda adalah generasi yang memiliki daya kritis dan sekaligus sebagai pewaris negara hukum.

Ada beberapa peristiwa besar yang mengingatkan eksistensi kaum muda sebagai oknum-oknum yang peduli akan integritas negara demokrasi dengan keterlibatan dalam rana politik. pertama, peringatan kebangkitan nasional dengan sejumlah besar kaum muda yang dipimpin Soetomo mendirikan Boedi Oetomo di Jakarta. Kedua, peringatan peristiwa sumpah pemuda. Ketiga, peristiwa Trisakti yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya era reformasi.

Eksistensi Politik Indonesia

Politik adalah perkara tata kelola hidup bersama, yang dalam konteks Indonesia tidak mungkin dicabut dari akar sejarah peziarahannya sebagai bangsa. Dalam kaca mata Aristoteles, politik adalah cetusan kesempurnaan kodrat sosialitas, rasionalitas sekaligus moralitas manusia. tetapi dalam bahasa Machiavelli politik dimasukan ke dalam perkara di luar wilayah wajar etika, politik ada dalam ranah kekuasaan. Siapa menang, berkuasa. Siapa kalah, pecundang. realita dinamika politik Indonesia tendensi irasionalitas. Irasionalitas politik itu telah menggiring pada ironi dan absurditas politik. Adanya berbagai peristiwa yang terjadi yang dilahirkan dari irasional politik menunjukkan bahwa dunia kehidupan kini telah menjelma menjadi panggung teater, yang di dalamnya dipertontonkan berbagai pertunjukkan irasionalitas berpolitik, dan melahirkan actor-aktor politik berwajah ganda, yang memproduksi kode-kode ganda dalam ucapan dan tindakan.

Ketakutan yang mengusik semua orang dan yang menjadi tema aktual yang kerap diperbincangkan menjelang kontestasi pemilu 2024 adalah terkait besarnya potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman berkembangnya politik dinasti. Hal ini dilatarbelakangi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia. Keputusan MK terkait uji materi pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang membuka ruang bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat wakil presiden.

Fenomena itupun menjadi kenyataan yang tidak dapat dielakan. Bahwa kontestasi pemilu diwarnai dengan persoalan keadaban demokrasi yang dibajak oleh kekuatan personal dengan bersandar pada personalisasi dan popularisme. Ini menunjukkan adanya hegemoni kekuasaan dan politik citra dengan cara membuat sinterklas yang dapat memengaruhi pilihan publik. Lebih lanjut, adanya aksi politik praktis yang meraja lela dengan memanifestasikan kekuasaan seperti, bansos. Inilah letak kekuasaan yang lebih merupakan strategi. Sementara dalam demokrasi, periode kekuasaan dibatasi untuk menghindari tendensi kekuasaan absolut. Konsep kekuasaan bukanlah kepemilikan, melainkan harus diletakan sebagai cara untuk menunaikan tanggung jawab dan memenuhi harapan rakyat. Berkenaan dengan konsep itu, ilmuwan Paul Michael Foucault menegaskan, bahwa kekuasaan kerap kali dipahami secara keliru yakni sebagai kapasitas agen untuk memaksakan kehendaknya atas kehendak orang atau pihak yang tak berdaya. Dalam konteks inilah kekuasaan diposisikan sebagai kepemilikan.

Pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi. Ditandai dengan terjadinya politik dinasti sebagai satu proses konsensi dari kekuasaan yang tidak lagi dibangun atas dasar kapabilitas dan kebenaran demokrasi, melainkan pada relasi kekeluargaan, sehingga berdampak pada kontestasi demokrasi yang tidak objektif, adil dan jujur. Kekuasaan dalam hal ini, lebih berorientasi pada kepentingan egoistik pribadi saja, kemudian mengabaikan sistem demokrasi yang terpelihara perlahan ditunggabalkan. Sehingga dalam hal ini, masyarakat akar rumput menjadi dirugikan akibat terbajaknya sistem demokrasi Indonesia oleh dinasti politik.

Dalam pandangan Hobbes, negara adalah stabil apabila undang-undangnya baik. Dan kekuasaan dijalankan tidak sewenang-wenang. Kualitas undang-undang dan pemerintahan negara seluruhnya tergantung dari kesadaran penguasa. Penguasa menjadi toko central sebagai pioner untuk membangun negara yang berlandaskan demokrasi. Dan kontestasi pemilu 2024 adalah perhelatan politik yang besar, yang tendensinya ke arah dinamika politik tidak etis. Fenomena itu menjadi satu ujian bagi bangsa Indonesia untuk membangun demokrasi, dan bukan hanya sekedar menjalankan mandat atau wasiat reformasi tahun 1998, melainkan lebih menunjukkan Tindakan praktis yang melahirkan sistem politik yang baik dan negara demokrasi yang matang. Legitimasi demokratis atau tuntutan penggunaan kekuasaan harus berdasar dan persetujuan dasar para warga negara dan senantiasa berada di bawah kontrol mereka, langsung mengandung tuntutan agar kekuasaan penguasa dijalankan berdasarkan dan dalam batas-batas hukum.

Hal serupa yang terjadi adalah, terlalu gemuknya kekuatan politik di pemerintahan. Di mana fenomena kebiasaan kekuatan rezim politik sejak Orde Baru hingga saat ini adalah merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan politik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan membangun zona nyaman kekuasaan. Serta bentuk pemerintahan yang berorientasi pada penyimpangan yang mengadopsi kebijakan personal dan kelompok dengan maksud untuk kepentingan kusus mereka sendiri. Ruang politik telah menciptakan aktor-aktor politik yang lebih mementingkan dirinya sendiri (selfish) seperti yang dilukiskan Hobbes, yaitu manusia-manusia yang dapat melakukan apa saja terhadap manusia lain dan negara demi tercapainya kepentingan personal dan kehendak untuk berkuasa.

Lebih lanjut, permainan politik telah menggiring ke arah semacam imoralisme politik, yang mana wacana politik dibangun oleh sikap tanpa rasa malu dan etika oleh permainan moralitas, oleh wajah politik bangsa yang berlandaskan hasrat dan kehendak kuasa tak terkendali, yang di dalamnya tidak ada kepedulian terhadap penciptaan wacana ruang publik dan wacana ruang politik yang berkualitas.

Peran Kaum Muda Dalam Politik Indonesia

Konsep-konsep di atas menggubris rasio masyarakat terutama kaum muda, bahwa adanya keberatan yang pantas disebut, sehubungan dengan kebutuhan penegasan sosial dari keputusan individu. Kendati penting bagi para individu untuk mendukung keputusan dan nilai aktivitasnya dari dalam, adalah sama pentingnya jika tidak jauh lebih penting bahwa orang lain menegasikan keputusan itu dari luar. Artinya bahwa, suatu kebijakan yang diambil harus memperhatikan aspek-aspek yang menjamin kebenaran akan kebijakan itu. Tidak bertitik tolak pada keuntungan personal atau golongan, melainkan wajib hukumnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Kemudian suatu kebijakan yang diambil harus melalui suatu konsensus publik dengan melalui pengujian yang rasional berdasarkan tuntutan publik dan negara hukum. Kendati pada satu sisi demokrasi memberikan ruang yang begitu luas kepada setiap warga negara untuk secara bebas berpolitik dan berpartisipasi dalam politik bagi setia warga, tetapi pada saat yang sama, kebebasan politik yang berlangsung cenderung kebablasan. Inilah cikal bakal lahirnya dinamika politik yang tidak etis serta sistem dan kebijakan yang diambil seorang pemimpin tendensi irasional.

Fenomena gerakan politik yang tidak etis secara perlahan mengeliminasi demokrasi. Hal itu menggugah kaum muda untuk mendobrak ideologi personal atau golongan dengan gerakan pemulihan sistem demokrasi. Artinya kaum muda dengan upaya rasional mengkritisi sistem pemerintahan agar bisa memahami struktur-struktur pengalaman dan realitas. Dengan antusiasme kaum muda turut berpartisipasi dalam politik.

Partisipasi kaum muda menjadi titik tolak untuk mendamaikan para politisi dan institusi-institusi sosial di mana mereka hidup dengan menunjukkan kepada mereka akan syarat-syarat fundamental hidup bernegara bersifat rasional kendati tampaknya berat. Rawls

mengangkat contoh, di sisi filsafat politik menciptakan syarat-syarat yang memungkinkan factum perbedaan yang fundamental dan esensial pandangan-pandangan global yang lahir atas dasar ideologi personal atau golongan serta pandangan politis berbeda. Dalam hal ini, kebenaran dalam pemilu tidak didominasi oleh kekuasaan penguasa. Karena Kekuasaan bukanlah representasi dari kebenaran.

Sejarawan Indonesia Taufik Abdullah menyebutkan pemuda atau generasi muda adalah konsep yang sering dibentuk oleh nilai-nilai. Maknanya bukan istilah ilmiah tetapi sering lebih merupakan pengertian ideologis. Pemuda sebagai harapan bangsa, pemuda harus dibina. Semua itu, menunjukkan syaratnya nilai-nilai yang melekat pada kata pemuda. Dengan pemahaman itu, kaum muda sebagai agen yang menentang segala bentuk sistem pemerintahan yang tidak relevan atau kontroversial dengan demokrasi, mendobrak ideologi personal pemimpin yang berpolitik dalam nuansa yang tendensi keluar dari sistem demokrasi. Hal ini berkorelasi dengan nilai kebenaran dalam bernegara dan berpolitik. Untuk menghadapi dinamika politik yang irasional, mesti mengonstruksi suatu Gerakan reformasi politik dengan tekanan dari kekuatan di luar sistem. Pada titik inilah, gerakan kaum muda, bahu membahu dengan kekuatan politik masyarakat lain, menemukan fungsinya. Karena kaum muda berperan sebagai ujung tombak, atau sebagai katalisator perubahan politik.

Kaum muda sebagai para cendekiawan (maha siswa), dengan kepiawaiannya dan secara kritis harus terus mengontrol sistem kepemimpinan dan dinamika politik yang berjalan di luar mekanisme resmi. Selama fenomena itu masih ada, selama itu pulalah Gerakan kaum muda relevan dan mempunyai fungsi. Gerakan kaum muda hanya dapat berakhir jika sistem politik dalam negeri dibuat semakin terlembaga dengan mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik. Pada taraf inilah peran kaum muda sangat urgen bagi perubahan dinamika politik yang dilahirkan dari hegemoni politik dan kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Dengan mengkritisi dan melalui berbagai demonstrasi, kaum muda harus agresif terhadap setiap sistem kepemimpinan irasional dalam pandangan publik dan secara khusus dalam negara hukum demokrasi.

Orientasi Gerakan kaum muda adalah gugatan struktur kekuasaan melalui pembentukan opini politik masyarakat luas, kemudian melakukan aksi massa, gerakan penyadaran atau gerakan dakwah di bidang sosial politik yang dilatarbelakangi dengan metode mobilisasi ide dan persepsi politik. Hal-hal inilah yang dibangun kaum muda dalam menyikapi bentuk politik yang dipertontonkan para aktor politik di era ini.

Kenyataannya, bahwa kebenaran sulit untuk dibela, atau malah dikatakan bahwa kebenaran itu tidak bisa dieja, dikalimatkan. Kebenaran selalu dalam pencarian dan penggapaian, karena para politikus sendiri menganalisa perilaku dan tindakan mereka cenderung mengabaikan dan menjauhi prinsip-prinsip, dan pengertian-pengertian yang menjadi struktur pemikiran politik. Cikal bakal kecenderungan itu adalah karena obsesi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan. Lalu fokusnya pada mobilisasi masa.

Lebih lanjut, dengan dinamika politik yang tendensi irasional, kaum muda harus membangun suatu front bersama rakyat dengan berpijak pada argumen bahwa Indonesia adalah negara hukum demokratis yang mengedepankan irasionalitas dalam memimpin serta mengambil suatu kebijakan dalam ranah pemerintahan, oleh karena itu, gerakan moral kaum muda dalam menyikapi fenomena demikian tidak cukup untuk melakukan proses transformasi dinamika politik secara fundamental. Dalam artian bahwa, ada semacam komitmen tentang perlunya gerakan kaum muda mentransformasi diri dari gerakan moral menjadi politik bernasib massa.

KESIMPULAN

Berkaca pada fenomena politik yang telah diulas di atas, maka pentingnya etika politik dibangun. Karena etika berpolitik menentukan rasionalitas setiap orang sebagai makhluk berpolitik. Pembangunan etika dalam berpolitik berorientasi pada integritas moral sebagai warga negara. Dalam hal ini kebenaran dalam demokrasi yang dilandaskan dengan integritas moral menjadi pintu masuk menuju bangsa dan negara yang utuh berdemokrasi.

Etika politik terbatas pada penyediaan instrument teoretis untuk bisa menjelaskan legitimasi politik secara rasional, yang tidak terjebak dalam dimensi emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, dan argumentatif. Hal ini, harus menjadi satu gerakan yang tidak dipengaruhi oleh tendensi personal yang terobsesi untuk memperoleh dukungan dan kemasyuran nama.

Politik mengenal etika perpolitikan dengan bercermin pada norma-norma yang menjadi satu kekuatan untuk mendobrak berbagai bentuk praktik politik yang berada dalam ruang gelap hingga merusak negara demokrasi. Politik yang baik adalah dengan menghindari kedangkalan, kepalsuan, dan mengutamakan kesantunan juga kedalaman dan keotentikan, serta menentang sistem pemerintahan yang mengekspresikan tirani dari pada kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Azra, Azyumardi. *Menjaga Indonesia, Dari Kebangsaan hingga Masa Depan Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2020.
- Gusti Madung, Otto. *Politik Antara Legalitas dan Moralitas*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Heryanto, Gun Gun. *RealitaS Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2020.
- J.A, Denny. *Gerakkan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an*. Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2006.
- Kymlicka, Will. *Filsafat Politik Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1987.
- Oxford University Press. *Aristoteles Politik*. Penerj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Penerbit Narasi Pustaka Promethea, 2016.
- Piliang, Yasraf A. *Transpolitika, Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Riyanto, E. Aramada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.
- Wibisana, Teddy, Nanang Pujalaksana, dan Rahadi T. Wiratama. *Alder a Potret Gerakan Politik Kaum Muda*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

II. Internet

- https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/287/5/118510003_file5.pdf, diakses pada 28 November 2024.
- <https://www.google.com/search?q=arti+kata+peran+dalam+KBBI&client>, diakses pada 28 November 2024.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=arti+peran+dalam+konteks+politik>, diakses pada 28 November 2024.